



## **Peranan Modal Sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Intoleransi di Nusa Tenggara Timur**

**Mirsel Robertus<sup>1</sup>; Felix Baghi<sup>2</sup>; Puplius M. Buru<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga/IFTK Ledalero

<sup>2</sup> Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT

<sup>3</sup> Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Flores, NTT

Pos-el: [rmirsel@yahoo.com](mailto:rmirsel@yahoo.com); [feliksbaghi@gmail.com](mailto:feliksbaghi@gmail.com); [pupliusmeinrad@yahoo.com](mailto:pupliusmeinrad@yahoo.com)

**Diajukan:** 28 Desember 2023; **Direview:** 03 Maret 2023; **Diterima:** 14 April 2023; **Dipublis:** 22 Juni 2023

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i1.330.55-71>

### **Abstract:**

*This article focuses on identifying social capitals in preventing and handling religious intolerance in West Sumba and Belu Regencies of NTT Province. Using qualitative approach, descriptive analysis, and employing interviews, and focused group discussions as methods of data collection, this study found that social capitals play a very crucial role as social bonding in all communities in the three regencies. These social capitals include values such as openness and willingness to accept others and differences, upholding unity and brotherhood, and traditional norms, customs (including kinship ties), symbols and language; the role of religious leaders, community leaders, traditional leaders, interreligious harmony forums (FKUB), and youth forums. All of these social capitals become a force that strengthens tolerance and prevents intolerance in the three regencies. The implication is that Indonesia as a whole and other parts of Indonesia can identify and use social capitals to strengthen tolerance and prevent intolerance among the people living in multicultural context.*

**Keywords:** social capital, intolerance prevention, social bonding, social bridging, social linking.

### **Pendahuluan**

Tahun 2019 Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia menobatkan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu dari tiga propinsi paling toleran di Indonesia, menyusul Propinsi Papua Barat dan Bali.<sup>1</sup> Ini tentu mengejutkan sekaligus menggembirakan di tengah maraknya sikap, pernyataan dan aksi-aksi intoleran atas nama agama maupun politik identitas baik pada level global maupun nasional saat ini, yang menyebabkan sendi-sendi kehidupan sosial yang harmonis dan

<sup>1</sup> Lembaga ini merilis indeks kerukunan beragama di Indonesia, di mana NTT menduduk posisi kedua tertinggi sesudah Papua Barat, yakni 81,1 dari skor 0 sampai 100. Papua Barat memiliki skor 82,1 dan Bali berada pada posisi ketiga, yakni 80,1. Skor ini lebih tinggi dari skor rata-rata secara nasional, 75,36. Selengkapnya tentang hal ini, lihat Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Indonesia. „Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019“, dalam <https://tirto.id/daftar-skor-indekskerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH>, diakses 3 Februari 2022.

perdamaian di banyak negara terancam koyak, dan lebih lanjut melahirkan kekerasan, diskriminasi religius, politik, dan sosial.

Indonesia sendiri tak luput dari masalah intoleransi. Beberapa studi menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kasus-kasus kekerasan, diskriminasi dan penyingkiran sebagai manifestasi dari intoleransi menggejala dan bahkan telah memengaruhi kaum milenial/muda.<sup>2</sup> Maka, penyematan label “propinsi ketiga paling toleran” bagi NTT merupakan suatu antitesis dari realitas global dan nasional yang terus diwarnai intoleransi, radikalisme, fundamentalisme agama dan terorisme dalam beberapa dekade terakhir ini.

Pertanyaannya, mengapa NTT dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia oleh Litbang Kementerian Agama RI? Kekuatan atau faktor-faktor manakah yang membuatnya mampu mempertahankan harmoni dan kerukunan serta membendung intoleransi? Secara spesifik, modal-modal sosial manakah yang menciptakan toleransi yang tinggi itu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dalam studi ini.

Tulisan ini bertujuan mengemukakan peranan modal-modal sosial (*social capitals*) di Kabupaten Sumba Barat dan Belu dalam mengembangkan toleransi dan mencegah intoleransi keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancara, *focused group discussion* dan studi dokumen, tulisan ini berusaha menggali nilai-nilai, norma, tatanan sosial dan berbagai elemen struktural yang menjadi kekuatan penopang toleransi dan kerukunan dan senjata pamungkas melawan intoleransi di ketiga wilayah tersebut.

Tulisan ini dibahas atas empat bagian utama. Pada bagian pertama dikemukakan konsep-konsep dasar tentang modal sosial (*social capital*). Bagian kedua merupakan tinjauan literatur mengenai intoleransi di Indonesia. Bagian ketiga menyajikan temuan-temuan dan analisis studi ini; dan bagian keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi.

### Memahami Konsep Modal Sosial

Untuk memahami upaya pencegahan intoleransi di Nusa Tenggara Timur berbasis modal sosial, studi ini coba menggunakan kerangka analisis bertolak dari teori Modal Sosial (*Social Capital*). Kita mulai dengan mengemukakan definisi modal sosial; menyusul pembahasan mengenai tipe-tipe modal sosial dan dimensi-dimensinya.

#### Definisi Modal Sosial

Ada banyak definisi tentang modal sosial. Menurut Pierre Bourdieu, “modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang terhimpun pada seorang individu atau kelompok karena memiliki

<sup>2</sup> Studi dan sorotan tentang masalah intoleransi ini lihat misalnya, Dylan Aprialdo Rachman, “Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsial-intoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-Indonesia>, diunduh 3 Februari 2022. Bdk. “Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan-31-kasus-intoleransi-selama-setahun>; “LIPI: Intoleransi Politik di Indonesia Meningkat”, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesia-meningkat/4687374.html>, diunduh 3 Februari 2022. Tentang Kaum Muda dan Intoleransi, lihat Zuly Qodir, “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, pp. 429 – 445; juga, M. Nurul Huda, *Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan*, PDF, Jakarta: The Wahid Foundation, 2017, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1VFWN8blwQzjCqDIHUwyFrCddOTouT8QU/view>, 5 Februari 2022.

jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.”<sup>3</sup> Sementara James Coleman mendefinisikan *social capital* sebagai “kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Secara fungsional *social capital* merupakan "aneka entitas dengan dua elemen yang sama, yaitu mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan aktor tertentu...dalam struktur.”<sup>4</sup> Modal sosial adalah segala sesuatu yang memfasilitasi tindakan individual atau kolektif, yang dihasilkan oleh jaringan hubungan timbal-balik, kepercayaan, dan norma-norma sosial.<sup>5</sup> Selanjutnya, Robert D. Putnam juga memberikan batasan tentang modal sosial sebagai “bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.”<sup>6</sup> Dengan definisi-definisi di atas, maka *social capital* dapat mencakupi struktur-struktur dalam masyarakat, jaringan, norma dan kepercayaan yang memungkinkan para individu atau aktor di dalamnya untuk bertindak sendiri atau bersama-sama secara efektif guna mendapatkan apa yang dicita-citakan bersama.

### Tipe dan Fungsi Modal Sosial

Terdapat banyak pandangan tentang tipe dan fungsi modal sosial. Secara umum terdapat dua pandangan atau perspektif yang dominan, yakni perspektif jaringan (*network perspective*) dan perspektif struktural sosial (*social structural perspective*). Dari perspektif jaringan, modal sosial dapat diklasifikasikan sebagai *bonding social capital*, *social bridging* dan *social linking*. Pertama, modal sosial yang mengikat (*social bonding*) adalah ikatan antar individu dengan tingkat ketertutupan jaringan yang relatif tinggi. *Social bonding* sering digambarkan sebagai ikatan horizontal antar individu dalam kelompok sosial yang sama (berlawanan dengan ikatan vertikal antar kelompok sosial). *Social bonding* sering dikaitkan dengan komunitas lokal di mana banyak orang mengenal banyak orang lain dalam kelompok (*network closure*). *Social bonding* sering juga dikaitkan dengan norma, adat istiadat, dan kepercayaan yang kuat yang dapat memiliki manifestasi positif dan negatif serta implikasi pengucilan sosial. Banyak anggota memiliki akses ke aset jaringan yang serupa, jadi sambil memberikan solidaritas, modal sosial yang mengikat mungkin tidak memberikan aset jaringan yang berguna dalam beberapa situasi.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Pierre Bourdieu. "Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital" in *Soziale Ungleichheiten* (Soziale Welt, Sonderheft 2), edited by Reinhard Kreckel. Goettingen: Otto Schartz & Co., 1983, hlm. 249.

<sup>4</sup> James C. Coleman. "Social Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology*. 94, 1988, hlm. 95–120.

<sup>5</sup> Alejandro Portes. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology". *Annual Review of Sociology*. 24, 1998, hlm. 1–24.

<sup>6</sup> Robert D. Putnam. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy*. 6 (1), Januari 1995, hlm. 65–78.

<sup>7</sup> T. Claridge. "Social Capital and Natural Resource Management: An important role for social capital?" Unpublished Thesis, University of Queensland, Brisbane, Australia, 2004 diakses 20 Februari 2022 dari <https://www.socialcapitalresearch.com/literature/introduction-social-capital-research/>. Bdk. M. Woolcock. "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework", *Theory and Society* 27 (2), 1998, hlm. 151-208. Bdk. M. Woolcock, "Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy," *World Bank Research* 15 (2), 2000, hlm. 225-249.

Modal sosial yang menjembatani (*social bridging*) adalah ikatan antar individu yang melintasi perbedaan sosial atau antar kelompok sosial. Dari perspektif jaringan, modal sosial yang menjembatani menempatkan para aktor pada lubang struktural di mana masing-masing dapat memanfaatkan sumber daya jaringan sosial dari kelompok sosialnya satu sama lain. Hal ini juga digambarkan sebagai ikatan vertikal yang sering beroperasi melalui struktur hierarkis formal. Menjembatani modal sosial mungkin tidak melibatkan banyak norma bersama tetapi kemungkinan besar terkait dengan relasi timbal balik dan masih tipisnya kepercayaan terhadap satu sama lain. Ini dapat memberikan akses ke sumber daya jaringan di luar lingkaran normal individu dan dengan demikian dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi individu (dan kelompok).<sup>8</sup>

Lebih jauh, menurut Claridge, modal sosial penghubung (*linking social capital*) adalah 'norma-norma rasa hormat dan jaringan hubungan saling percaya antara orang-orang yang berinteraksi lintas kekuatan atau otoritas yang eksplisit, formal, atau dilembagakan atau gradien dalam masyarakat'. Dalam banyak hal modal sosial yang menghubungkan tidak jauh berbeda dengan modal sosial yang menjembatani.<sup>9</sup>

### *Perspektif Struktural Sosial*

Meskipun dimungkinkan untuk membedakan antara berbagai jenis modal sosial berdasarkan sumber, bentuk kognitif dan struktural dari modal sosial umumnya terhubung dan saling menguatkan. Ini mencakup: modal sosial struktural yang mengacu pada elemen struktur sosial yang menciptakan peluang bagi perwujudan sosial dari tujuan produktif. Modal sosial struktural mencakup peran yang mapan dan jaringan sosial yang dilengkapi dengan aturan, prosedur, dan preseden. Ini memberi struktur dan stabilitas pada transaksi sosial. Lebih dari norma, modal sosial struktural dibangun dari fondasi historis budaya dan institusi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Selain itu, ada modal sosial kognitif yang mencakup norma, nilai, sikap, dan keyakinan bersama, yang mendorong orang menuju tindakan kolektif yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah modal sosial relasional yang didasarkan pada karakteristik hubungan sosial antar individu dan umumnya digambarkan sebagai termasuk kepercayaan dan kepercayaan.<sup>11</sup>

Menurut T. Claridge, klasifikasi modal sosial ke dalam tipe-tipe seperti ini memberikan cara yang kaya dan deskriptif untuk berbicara tentang modal sosial. Tipe jaringan dan tipe struktural memberikan dua cara yang berbeda untuk menggambarkan elemen modal sosial dan dapat digunakan secara bergantian.<sup>12</sup>

Dari keseluruhan pemikiran tentang modal sosial di atas dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam struktur-struktur sosial dan relasi antara anggota masyarakat. Hal ini juga diasumsikan berlaku di NTT sebagai kekuatan untuk membangun toleransi dan membendung intoleransi dalam masyarakat. Modal-modal sosial itu adalah jejaring hubungan, jalinan-jalinan, ikatan-ikatan sosial, jejaring organisasi, simbol-simbol (termasuk bahasa dan bangunan seperti

---

<sup>8</sup> T. Claridge, *Loc. cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

rumah adat), nilai-nilai dan norma-norma serta struktur-struktur sosial yang mereka miliki. Modal-modal sosial ini memungkinkan terjalinnya kerjasama dan pembentukan kerukunan antar-warga NTT yang multikultural, multi-etnis dan multi-agama dan menjadi kekuatan bersama membendung intoleransi yang boleh jadi datang dari luar. Modal sosial menjadi sumber-sumber daya yang berkembang pada individu ataupun kelompok individu berupa kepercayaan, norma-norma sosial, dan jaringan sosial yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Adapun tiga unsur modal sosial tersebut mencakupi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial.

### Masalah Intoleransi di Indonesia

Studi-studi menunjukkan bahwa kasus-kasus intoleransi religius dan politik di Indonesia meningkat dan merupakan hal yang paling dominan, di mana kelompok-kelompok mayoritas religius cenderung bersikap diskriminatif dan eksklusif terhadap kelompok minoritas.<sup>13</sup> Terdapat dua bentuk intoleransi yang ditemukan di Indonesia: yang pertama adalah intoleransi pasif, yaitu suatu keadaan di mana seorang individu atau kelompok intoleran terhadap kehadiran yang lain dengan sikap masabodoh secara diam-diam dan belum mengarah kepada tindakan kekerasan; sedangkan yang kedua adalah intoleransi aktif, di mana pihak yang intoleran sudah mengarahkan perilakunya kepada kekerasan (verbal, psikis, dan fisik).<sup>14</sup>

Lebih jauh, menurut studi Lembaga Imparsial, meningkatnya intoleransi di Indonesia disebabkan oleh aturan hukum atau kebijakan lainnya yang saling bertentangan. Saat ini memang ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun, di sisi lain, terdapat pula aturan dan kebijakan yang bisa mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi tetap dipertahankan. Misalnya, Undang-Undang Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan Bersama (PBM) 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, serta keberadaan berbagai peraturan di daerah seperti SK Gubernur, Bupati, Perda atau SKB lainnya yang bersifat membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan.<sup>15</sup>

Pada tahun 2017, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melakukan kajian tentang sikap toleransi, khususnya toleransi di bidang agama, di Indonesia dan faktor-faktornya berdasarkan data SUSENAS 2014. Kajian ini menunjukkan bahwa sikap toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan agama lain di Indonesia cenderung rendah.<sup>16</sup>

Zuly Qodir dalam artikelnya “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, mengemukakan bahwa intoleransi dan radikalisme telah merasuki kaum muda, dan ini telah menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Menurut dia, ada banyak faktor lahirnya intoleransi dan

<sup>13</sup> Rachman, *op.cit.*

<sup>14</sup> Halili, *Supremasi Intoleransi*, (Yogyakarta: Setara Institute, 2017) dalam <https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/resensi-buku-supremasi-intoleransi/>. Diunduh 8 Februari 2022.

<sup>15</sup> Rachman, *Op.cit.*

<sup>16</sup> Selengkapnya tentang hasil kajian ini, baca Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *ANALISIS SIKAP TOLERANSI DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR*, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

radikalisme di kalangan kaum muda, termasuk dampak munculnya gerakan Negara Islam ISIS di Timur Tengah dengan berbagai aktivitas kekerasan yang mereka lakukan di Irak dan Suriah. Selain itu, dia mengemukakan beberapa alternatif untuk mengurangi gerakan intoleransi dan radikalisme di kalangan kaum muda ini, termasuk gerakan keagamaan yang berasal dari organisasi massa seperti Muhammadiyah dan NU.<sup>17</sup>

Tahun 2016 the Wahid Foundation melakukan studi mengenai radikalisme dan intoleransi di kalangan kaum muda. Lembaga ini melakukan survei terhadap Organisasi Rohani Islam (Rohis) Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Survei ini menunjukkan bahwa 60% responden bersedia menjalankan misi Jihad ke negara-negara yang dilanda konflik agama; 68% responden bersedia untuk melanjutkan misi tersebut di masa depan; sementara itu, 37% responden yang sangat setuju, dan ada 41% responden yang setuju dengan gagasan bahwa Islam harus digabungkan menjadi satu kekhalifahan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa intoleransi memengaruhi berbagai pihak termasuk kaum muda yang rentan menjadi korban indoktrinasi kekerasan atas nama agama. Ini diperkuat oleh studi The Wahid Foundation ini yang menemukan bahwa kelas menengah muda muslim berada pada situasi kecemasan sosial akan ketidakpastian perkembangan ekonomi, pendidikan, dan politik pada tingkat lokal dan nasional. Kecemasan tersebut didukung oleh berkembang bebasnya akses internet yang tidak menjamin adanya ruang dialog yang terbuka dan positif. Akhirnya, alih-alih tercerahkan, banyak dari kelompok millennial cenderung rentan terpapar dampak negatif dari pemahaman agama instan yang disajikan lewat media sosial.<sup>18</sup>

## Temuan dan Pembahasan

### Temuan

#### *Gambaran umum relasi antar-umat beragama*

Hubungan antar-umat beragama di Kabupaten Sumba Barat dan Belu secara umum baik, yang ditandai dengan rasa persaudaraan, ada keterbukaan dan suasana kedekatan yang melintasi sekat perbedaan agama dan suku. Adanya pertemuan-pertemuan dan interaksi informal setiap hari dapat dijumpai baik di komunitas kota maupun komunitas pedesaan. Keakraban, tegur-sapa menjadi hal biasa. Ini berlaku bukan hanya untuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat/masyarakat melainkan juga untuk masyarakat biasa. Hal ini benar tentang relasi antar umat beragama di Sumba Barat. Farid Liliweri, pemuda Islam Masjid Baitullah Ridwan berkata, “relasi antara umat beragama di Waikabubak dipandang baik. Ada keterlibatan pemuda gereja dan OMK (Orang Muda Katholik) dalam bidang keamanan di hari Idul Fitrih dan sebaliknya.”<sup>19</sup> Selain itu, pendeta GKS, Apliana Moto, menyatakan bahwa di Sumba Barat, “relasi dan hubungan antara agama sangat baik terjalin, hal ini dipengaruhi oleh faktor hubungan emosional, hubungan kekerabatan, seperti ada yang dari Kristen pindah Islam atau sebaliknya dari Islam pindah ke Kristen, pertalian darah ini sangat kuat terbangun. Sehingga kita tidak menganggap perbedaan

<sup>17</sup> Selengkapnya, baca Zuly Qodir berjudul “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, pp. 429 – 445.

<sup>18</sup> M. Nurul Huda, “Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan” Paper PDF, Jakarta: The Wahid Foundation, 2017, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1VFWN8blwQzjCqDIHUwyFrCddOTouT8QU/view>, diunduh 10 Februari 2022.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Farid Liliweri, 27 thn, Waikabubak, 21 Juni, 2022.

itu menciptakan gap antara kita sebagai umat beragama, tapi perbedaan adalah sesuatu yang perlu disyukuri karena perbedaan itu sendiri adalah keindahan.”<sup>20</sup>

### ***Modal-Modal Sosial Komunitas***

Modal-modal sosial yang dimiliki komunitas-komunitas agama dan masyarakat adat untuk mencegah intoleransi dan memelihara toleransi antar umat beragama mencakupi beberapa unsur antara lain tentang peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, FKUB, dan pemerintah daerah setempat.

#### **Peran tokoh agama**

Peranan para tokoh agama di Kabupaten Sumba Barat dalam mencegah intoleransi dan mengatasi konflik sangat nyata. Para peserta FGD di Waikabubak menyatakan bahwa di Sumba Barat ada pembinaan iman yang terbuka dari para tokoh di masing-masing agama, kerjasama antara FKUB, para stakeholders dalam membina komunitas antar umat beragama, usaha penyadaran terhadap berita bohong (*hoax*), kewaspadaan terhadap informasi palsu tentang agama dan keyakinan lain, dan tentang ujaran kebencian di media sosial.<sup>21</sup> Tentang hal yang sama, Aloysius Saga Runga, warga Desa Bera Dolu, Waikabubak, memberi kesaksian bahwa “konflik dengan latar belakang agama belum pernah terjadi di desa kami ini.” Hal ini disebabkan karena para pastor, pendeta, majelis dan para pembina umat Islam selalu bekerja sama untuk “memberi penyadaran kepada umat mereka masing-masing.”<sup>22</sup>

Peran para tokoh agama di Kabupaten Belu cukup menonjol dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik bernuansa agama. Peran mereka ini diteguhkan oleh relasi yang baik antara para tokoh agama yang ada di Kabupaten Belu, yang menjadi contoh yang baik bagi umat dalam upaya membangun toleransi antara umat beragama. Relasi yang baik ini tampak misalnya dalam upaya menjalin komunikasi (dialog) dan kerja sama untuk menanggapi isu-isu SARA yang berkembang dan untuk menyelesaikan konflik-konflik atau kesalahpahaman yang berpeluang menciptakan tindakan-tindakan intoleran.<sup>23</sup>

#### **Peranan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat**

Peran tokoh masyarakat dan tokoh adat di Sumba Barat dalam mencegah intoleransi dan konflik sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari inisiatif dan kreativitas mereka memfasilitasi dialog kehidupan. Misalnya “Rato Marapu” atau imam kepercayaan asli di Sumba Barat memiliki kekuasaan untuk menentukan perayaan “wulla poddu” atau perayaan “bulan pahit” yaitu suatu perayaan di mana selama bulan-bulan tertentu ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi dan serangkaian ritual adat yang harus dijalankan bersama untuk meminta berkat dari langit. Rato Lado Regi Tera, imam marapu dari kampung Tarung misalnya berkata “pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sumba Barat selama “wulla poddu” adalah tidak boleh membangun rumah, mengadakan pesta apapun,

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Apliani Moto, 38 thn, Waikabubak, 13 Juni 2022.

<sup>21</sup> FGD di Waikabubak 28 Juni 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aloysius Saga Ngara, 39 thn, di Bera Dolu, Waikabubak, 15 Juni 2022.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Romo Yonas S. Giri, Pastor Paroki Stella Maris Atapupu, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua dan anggota FKUB Kabupaten Belu, tanggal 29 Juni 2022.

ketika seseorang meninggal di dunia, warga dilarang memukul gong, memanjat pohon ataupun memperbaiki bagian atas rumah.”<sup>24</sup> Rahel Buma, guru agama Kristen berkata, “sejauh ini saya melihat bahwa hubungan antar agama dengan marapu juga baik, buktinya selama ini tidak ada gangguan ketika kita beribadah, begitupun ketika marapu menjalankan ritual adat juga kita tidak mengganggu dengan cara menghargai setiap larangan yang diperintahkan.”<sup>25</sup> Ini adalah suatu bentuk toleransi akar rumput. Masyarakat atau umat beragama saling memberi ruang untuk menjalankan ibadah mereka dengan sikap yang dewasa dan penuh persaudaraan.

Di Kabupaten Belu para tokoh adat juga menjadi satu elemen penting dalam kehidupan bersama dengan latar belakang agama berbeda dan mereka memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi konflik yang bernuansa agama. Keterbukaan para tokoh adat yang pada umumnya beragama Katolik untuk menerima mereka yang beragama lain dan untuk hidup bersama di wilayah Kabupaten Belu patut mendapat pengakuan. Para tokoh masyarakat di Kabupaten Belu menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan, misalnya terhadap para pendatang baru maupun terhadap pembangunan rumah ibadah di lingkungan mereka.<sup>26</sup> Para Tokoh ini merupakan pihak pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat bila terjadi konflik atau tersebar isu yang berpotensi merusak kerukunan beragama. Mereka juga turut berupaya mencegah terjadinya konflik bernuansa agama dengan membangun dialog dengan umat berbeda agama dan juga memberi penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan bersama. Salah satu contoh dialog yang pernah dibuat adalah dengan mengundang dan berbicara dengan beberapa pimpinan aliran atau denominasi baru (agama kristen) yang dirasa sangat militan dalam menyebarkan ajaran mereka sampai dianggap mengganggu kerukunan umat setempat.<sup>27</sup>

#### Peranan FKUB

Mirip dengan peran tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, peranan FKUB di Sumba Barat dapat digali dari forum diskusi sehari bersama semua utusan FKUB dengan Kementerian agama Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 28 Juni 2022. Umat beragama di Sumba Barat sudah biasa hidup di tengah heterogenitas antara Kristen, Katholik, Islam, Budha dan Marapu. Ada penerimaan satu terhadap yang lain. Suasana persaudaraan FKUB sangat kental. Mereka saling menyapa dan bersendagurau sebagai saudara. Suasana ini tercipta karena adanya keterbukaan hati dan pikiran yang sangat bijaksana untuk saling mengakui eksistensi masing-masing agama dan kepercayaan. FKUB menjadi garda depan untuk menganimasi kerukunan antara umat beragama dan aliran keyakinan di Sumba Barat. Ketua MUI Sumba Barat berkata: “Sejak awal, orang Sumba sudah menyadari perbedaan, namun perbedaan itu menjadi kekuatan untuk saling mengakui dan menerima. Perbedaan tidak menjadi halangan untuk kawin mengawin karena orang Sumba sudah memiliki dasar hidup sosial yang baik”.<sup>28</sup>

Di kabupaten Belu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan salah modal sosial penting dalam mencegah dan mengatasi konflik bernuansa agama serta membina kerukunan hidup umat

<sup>24</sup> Wawancara dengan Lado Regi Tera, 49, di Kampung Tarung, Waikabubak, 27 juni 2022.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Rahel Buma, 30 thn, di Waikabubak, 13 Juni 2022.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Fahmi Attamimi, Takmir Masjid Atapupu, 29 Juni 2022; wawancara dengan Mores Lakabela, Wakil Ketua / Majelis Gereja Petra (GMIT) Atapupu, 29 Juni 2022.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pius Maksi Mura, Tokoh adat, Atapupu, 1 Juli 2022.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Abdullah A. Bumaalin, ketua MUI, Waikabubak, 28 Juni 2022.



beragama. Peran mereka tampak dalam upaya-upaya seperti memfasilitasi dialog antar umat beragama, dialog dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyikapi isu-isu yang menyedihkan atau untuk menyelesaikan konflik-konflik yang bisa mengarah pada gangguan terhadap kerukunan hidup umat beragama.<sup>29</sup> Kegiatan-kegiatan konkret mereka antara lain menyelenggarakan pertemuan, ceramah, seminar dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentang aturan-aturan pembangunan rumah ibadah dan lembaga - lembaga keagamaan.<sup>30</sup>

#### Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah (Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat) dirasakan sangat berarti. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan animasi dan program yang jelas dan terarah dari kantor Kementerian Agama Sumba Barat, khusus melalui kerja struktural di bagian sekretariat, bagian seksi pendidikan dan BIMAS Islam, seksi pendidikan kristen, seksi urusan agama kristen, seksi BIMAS Katholik, penyelenggaraan Haji dan umrah, kerja sama dengan madrasah, sekolah keagamaan Kristen di bawah koordinasi kementerian agama dan kerjasama dengan sekolah Katholik di bawah koordinasi BIMAS Katholik Kabupaten Sumba Barat. Kesaksian pemuda Islam Farid Liliweri mengatakan bahwa pemerintah sangat memfasilitasi agar hubungan baik antar umat beragama di Sumba Barat ini tetap baik,<sup>31</sup> dan dari ketua PDH Hindu yang mengatakan bahwa peranan pemerintah yang sangat kuat mendukung toleransi dan bahwa tokoh Marapu juga sering dilibatkan dalam semua kegiatan dalam rangka menjaga toleransi antar-umat beragama.<sup>32</sup>

Di Kabupaten Belu pemerintah juga berperan penting dalam mencegah dan mengatasi konflik bernuansa agama. Perannya tampak terutama dalam upaya mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang tidak diskriminatif terhadap salah satu agama dan mengawasi pelaksanaan aturan umum. Pengawasan ini dilakukan misalnya lewat Dinas Kementerian Agama untuk mengontrol persyaratan pendirian rumah ibadah atau Lembaga keagamaan, memastikan bahwa kehadiran aliran-aliran agama tertentu tidak menyebarkan ajaran-ajaran radikal, tidak menyedihkan masyarakat dan tidak mengganggu kerukunan dalam kehidupan bersama. Dalam merespons isu-isu atau konflik yang mengganggu kerukunan umat beragama di Kabupaten Belu pemerintah berusaha menjalin kerja sama yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak keamanan. Kerja sama dan komunikasi yang baik di antara mereka ini telah terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah setiap konflik bernuansa agama.<sup>33</sup>

#### *Mengidentifikasi Gejala Intoleransi*

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Haji Kaliman B. Lamarobak, S.Pd, MH, Ketua Umum MUI Kab. Belu dan Wakil Ketua 2 FKUB Kab. Belu, Atambua, 9 Juli 2022.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rm. Stefanus Boisala, Pr, Pastor Paroki Katedral Atambu, Deken Belu Utara dan Ketua FKUB Kab. Belu, Atambua, 29 Juni 2022.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Farid Liliweri, 27 thn, di Waikabubak, 21 Juni 2022.

<sup>32</sup> Ketut Putra Adnyama, 66 thn, Waikabubak, 16 Juni 2022.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Eduard Mauboy, umat Kristen (GMIT), 30 Juni 2022; Wawancara dengan Jeremias Manek Seran, tokoh pemerintah, Ketua DPR Belu, 30-06-2022.

Para informan ditanyai tentang ada-tidaknya gejala-gejala intoleransi di dalam komunitas-komunitas mereka, seperti ujaran kebencian, sebaran fitnah, berita bohong (*hoax*), *sweeping* tempat ibadah, penolakan orang beragama atau berkeyakinan lain dalam komunitas, penolakan dan pencegahan pembangunan tempat ibadah dan kebijakan/peraturan pemerintah yang diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Tentang gejala intoleransi, semua informan di Sumba Barat menyatakan bahwa gejala intoleransi tidak kasat mata dalam pengertian konflik nyata dan terbuka yang berbasis agama, suku, dan ras. Namun kenyataan juga berbicara tentang *hoax* melalui media sosial. *Hoax* bisa menjadi pemicu intoleransi jika pengguna media sosial tidak cerdas dan cermat menyimak setiap berita yang masuk. Tentang hal ini, Ustad Yamin menyatakan pentingnya “mewaspada para provokator media sosial dan hal ini perlu menjadi tanggungjawab bersama untuk menangkal *hoax*.”<sup>34</sup> Gejala intoleransi pernah dialami oleh kelompok Islam di wilayah mayoritas Kristen misalnya “penolakan pembangunan Mushola di Laura oleh masyarakat dengan alasan bahwa di sana mayoritas penduduknya Kristen dan umat Muslim yang berdomisili di Laura tidak banyak.”<sup>35</sup> Namun, secara umum tindakan intoleran belum terjadi dalam bentuk konflik yang besar atau perang antara agama atau antara suku yang memakan korban.

Sementara itu, informan di Kabupaten Belu mengungkapkan bahwa gejala-gejala intoleransi seperti ujaran kebencian, sebaran fitnah, berita bohong (*hoax*), *sweeping* tempat ibadah atau kegiatan keagamaan jarang atau hampir tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.<sup>36</sup> Seorang informan bernama Fransiskus Didoek menceritakan kejadian tahun 2018 tentang reaksi beberapa anggota masyarakat menanggapi kegiatan keagamaan dari salah satu denominasi Kristen di sekitar Patung Kuda, kota Atambua yang dirasa cukup mengganggu masyarakat sekitar. Meskipun demikian, tidak terjadi tindakan anarkis dan para oknum ditegur dengan pendekatan kekeluargaan. Hal serupa terjadi di Tulamalae tahun 2020, di mana seorang anggota masyarakat merombak sebagian rumahnya menjadi tempat ibadah salah satu aliran Kristen dan melangsungkan ibadah keagamaan di rumah itu. Hal ini dianggap mengganggu masyarakat sekitar sehingga para tokoh masyarakat langsung berdialog dengan kelompok Kristen itu dan meminta mereka menghargai kerukunan dan aturan yang ada di Atambua.<sup>37</sup> Selain itu, tahun 2021 terjadi kasus penolakan terhadap kehadiran umat beragama lain oleh umat dari beberapa denominasi yang telah lama eksis di Kabupaten Belu. Ini disebabkan oleh adanya informasi bahwa sebuah “agama baru” telah masuk dan merekrut orang-orang dari gereja tertentu untuk menjadi anggotanya serta memberikan donasi kepada orang-orang tidak mampu sambil mewajibkan mereka untuk berkumpul dan berdoa bersama setiap hari Jumat dan Minggu di gereja “agama baru” ini. Karena itu, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah dan tokoh agama melakukan pendekatan kekeluargaan dan memberikan teguran agar gerakan itu dihentikan.<sup>38</sup>

### ***Upaya Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Intoleransi***

Berhadapan dengan berbagai hal-hal yang dibentuk atau dilakukan untuk mencegah intoleransi dan membina toleransi serta kerukunan di komunitas-komunitas ini? Di Sumba Barat, tindakan konkret yang

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ustad Yamin, 49 thn, Waikabubak, 21 Juni 2022.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Haji Umbu Nay, 72 thn, di Waikabubak, 21 Juni 2022.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Romo Paulus Nahak I, Pr, Sekretaris FKUB Kab. Belu, 29 Juni 2022.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bpk. Fransiskus Didoek selaku Umat Katolik Atambua, 1 Juli 2022

<sup>38</sup> Wawancara dengan Romo Stefanus Boisala, Pr, Ketua FKUB Kab. Belu.

dilakukan untuk mencegah konflik dan intoleransi dapat dilihat dari adanya praktek-praktek gotong-royong sebagai kearifan lokal, semangat menjunjung tinggi kekeluargaan, pembinaan para tokoh agama, kerjasama antara FKUB, stakeholders dalam membina komunikasi antar umat beragama. Tentang hal ini, Ketua MUI Sumba Barat memberi kesaksian tentang kekuatan sosial dan kultural yang dapat mencegah intoleransi dalam sikap menjaga “tali kekeluargaan, ... setia menghadiri acara atau kedukaan di kampung-kampung di mana saudara-saudara menyiapkan makanan untuk kaum muslim dan hal ini sesuatu dengan kebiasaan setempat menjaga apa yang disebut ‘piring keramat’, yaitu piring yang disiapkan khusus untuk saudara muslim karena mereka tidak makan daging babi.”<sup>39</sup>

Di Kabupaten Belu terdapat organisasi yang memfasilitasi pencegahan intoleransi dan membina toleransi antar umat beragama. Beberapa organisasi yang sempat disebutkan, meskipun perannya belum maksimal adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kelompok doa SMGM (Sahabat Monsinyur Gabriel Manek)<sup>40</sup> dan banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. Selain itu, terdapat forum silaturahmi yang dibentuk antar-umat beragama, antar-suku, dan antar-daerah. Forum ini di satu sisi bersifat formal, di mana ia melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat (misalnya yang di oleh Mgr. Dominikus Saku, Pr., Uskup Atambua bersama para pastor mengunjungi Ketua MUI Kabupaten Belu), ada yang bersifat informal dan dilakukan spontan seperti silaturahmi saat hari Raya agama tertentu atau hajatan-hajatan bersama dan menjaga keamanan saat Hari Raya agama tertentu. Selain itu, mereka juga mempraktekkan dialog kehidupan, bekerja sama dalam kehidupan konkret tanpa mempersoalkan perbedaan agama di antara mereka. Sementara itu peran kaum muda untuk menjaga toleransi dan mencegah intoleransi di wilayah Kabupaten Belu tampak khususnya pada perayaan-perayaan keagamaan. Misalnya, kaum muda Katolik dan Kristen Protestan berperan aktif dalam memperlancar jalannya perayaan dengan cara menjaga keamanan demi terselenggaranya hari raya Idul Fitri yang dilangsungkan oleh umat Islam. Demikian pun sebaliknya yang dilakukan oleh Remaja Masjid dan Pemuda Hindu dan Budha pada hari Raya Paskah atau Natal umat Katolik dan Protestan.<sup>41</sup>

### ***Pengaruh adat-istiadat***

Adat-istiadat dan budaya setempat juga digali perannya dalam upaya menjaga toleransi dan mengatasi intoleransi/konflik antar-suku, agama dan ras di komunitas-komunitas beda agama di NTT. Situasi di Sumba Barat menunjukkan, bahwa adat masih berpengaruh dalam tatanan hidup sosial, terlebih dalam mencegah intoleransi dan menjaga toleransi. Aloysius Saga Runga seorang Katolik yang masih menganut keyakinan Marapu memberi kesaksian demikian: “saya merasa bahwa budaya Marapu ini sangat terbuka. Di dalam Marapu kami diajarkan untuk mengasihi sesama, menghargai sesama, ini ajaran penting yang kadang orang lupa karena kebanyakan orang menganggap Marapu adalah penyembahan terhadap leluhur; mereka tidak melihat bahwa hal paling dasar yang diajarkan Marapu adalah cinta

<sup>39</sup> FGD, Waikabubak, 28 Juni 2022.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Imelda Lazakar, Atambua, 30 Juni 2022.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Pdt. Novemberieli Ziraluo, S.Th., Wakil Gembala GPdI Shalom Atambua/Anggota FKUB, 9 Juli 2022.

terhadap pencipta dan cinta terhadap sesama. Ajaran ini sebenarnya juga menjadi dasar ajaran setiap agama.”<sup>42</sup> Pandangan ini diamine oleh semua peserta FGD di Sumba Barat.

Mengenai peran adat-istiadat di Kabupaten Belu tak banyak berbeda dengan Kabupaten Sumba Barat. Orang Belu sangat terbuka menerima orang lain dari luar suku, adat dan budaya Belu dan sangat menghargai mereka. Dalam kehidupan sehari-hari orang Belu tidak mempersoalkan asal-usul atau latar belakang seseorang.<sup>43</sup> Penduduk asli Kabupaten Belu didominasi oleh suku Tetun, disusul suku Bunaq, Kemak dan Dawan dan mereka pada umumnya adalah pemeluk agama Katolik, sehingga umat katolik menjadi mayoritas (hampir 90%) di wilayah kabupaten ini.<sup>44</sup> Nama Belu sendiri berasal dari kata bahasa Tetun yang berarti sahabat dan wilayah ini dikenal dengan sebutan „Rai Belu“: Tanah Sahabat. Nama ini sendiri menggambarkan filosofi orang Belu yang terbuka untuk hidup bersama orang lain tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Nilai-nilai budaya orang Belu dirangkum dalam tatanan nilai yang dikenal dengan istilah *kneter-ктаек* (baca: neter – taek, etika saling menghormati – saling menghargai).<sup>45</sup>

### Pembahasan

Studi ini menggambarkan secara umum bahwa toleransi merupakan warna dasar relasi dan struktur sosial komunitas-komunitas umat berbeda agama di Kabupaten Sumba Barat dan Belu. Beberapa gejala yang mengarah kepada konflik terbuka antar umat beragama beberapa tahun silam terkait dengan adanya upaya-upaya kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang mencoba merekrut anggota baru ke dalam kelompok keagamaannya dan mobilisasi masa karena terprovokasi berita bohong terkait pelecehan terhadap anggota agama tertentu seperti yang pernah terjadi di Belu dapat diatasi dan diredam, sehingga relasi harmonis dan toleran tetap terjalin kembali. Hal ini memperkuat temuan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Indonesia tahun 2019 yang menempatkan NTT sebagai propinsi kedua paling toleran di Indonesia setelah Papua Barat, jauh lebih tinggi dari indeks kerukunan nasional sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan di kedua wilayah tersebut umumnya hidup harmonis, rukun dan damai.

Hal ini dimungkinkan oleh adanya modal-modal sosial (*social capitals*) yang merupakan sumber daya nyata ataupun maya (*actual or virtual resources*), yang terhimpun pada masyarakat di kedua kabupaten, karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang terinstitusionalisasikan; juga, karena masyarakat di kedua kabupaten memiliki kemampuan untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi serta struktur sosial budaya yang memfasilitasi tindakan-tindakan aktor (individual dan kolektif) dalam struktur tersebut. Selain itu, masyarakat di kedua kabupaten memiliki modal sosial yang memfasilitasi tindakan individual atau kolektif, yang diperoleh melalui jaringan relasi timbal-balik, kepercayaan, dan norma-norma sosial. Dengan kata lain, kunci kekuatan masyarakat Belu dan Sumba Barat dalam

<sup>42</sup> Wawancara dengan Aloysius Saga Runga, 39 thn, Desa Dolu, Waikabubak, 15 Juni 2022.

<sup>43</sup> Wawancara dengan I Made Balik, Ketua PHDI dan Anggota FKUB Kab. Belu, 9 Juli 2022.

<sup>44</sup> Mayoritas penduduk di Kabupaten Belu beragama Katolik (89,83%), diikuti Kristen Protestan (7,11%), Islam (2,76%), Hindu (0,12%) dan Buddha (0,01%), [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Belu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belu) (diakses tanggal 30 Juni 2022).

<sup>45</sup> Herman Joseph Seran, *Emu Tetun. Continuity and Change in the Social and Cultural Life of a Tradicional Society in Central Timor Eastern Indonesia*, Kupang: Gita Kasih 2007, hlm. 64-65.

mencegah intoleransi dan membangun kehidupan yang rukun, damai dan harmonis adalah kemampuan mereka dalam mengembangkan bagian-bagian terpenting dari kehidupan sosial mereka seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong para anggotanya bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan mereka bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera.

Dari temuan-temuan dalam studi ini juga, kita coba mengelompokkan modal-modal sosial menurut tipologi Michael Woolcock yang membedakan tiga macam modal sosial, yakni *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital*.

#### ***Modal sosial yang mengikat (bonding social capital)***

Ikatan-ikatan sosial (*bonding social capital*) yang dapat ditemukan dan memberi kontribusi penting bagi pencegahan intoleransi di Kabupaten Sumba Barat dan Belu adalah nilai persaudaraan, harmoni, persatuan, dan kekeluargaan yang dimiliki oleh masing-masing komunitas, yang mengikat mereka bersama-sama. Juga persepsi-persepsi positif terhadap sesama yang dibangun baik dalam hubungan antar-warga komunitas maupun dalam konteks relasi dengan orang-orang lain yang berasal dari luar komunitas mereka. Ini ditemukan di dalam sistem kekerabatan yang bersifat mengikat dan menyatukan. Nilai-nilai dan norma menjadi bagian dari perilaku yang berlaku bagi setiap individu dan kemudian diwariskan sebagai tradisi yang baik dan terus mengikat kuat warga komunitas. Di dalam sistem kekerabatan terwujud rasa simpati, percaya, resiprositas dan pengakuan timbal-balik sebagai nilai-nilai kebudayaan yang diterima, diakui dan dipercaya bersama. Para anggota komunitas diharapkan menjadi penganut, penjaga dan pewaris nilai, tradisi dan adat-istiadat dari generasi ke generasi dan terbuka untuk berinteraksi dengan berbagai pihak dengan latar belakang berbeda-beda.

Beberapa ikatan sosial nyata yang diidentifikasi dalam studi ini dan yang berperan sangat besar dalam menjaga toleransi serta mencegah intoleransi antara lain nilai tradisi budaya dan adat-istiadat di masing-masing wilayah, kuatnya peran tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pemerintah dan forum kerukunan umat beragama (FKUB). Ketika elemen-elemen ini menyatu dan bersinergi, mereka bersama-sama membangun suatu kehidupan bersama yang harmonis dan memiliki kekuatan untuk membendung pengaruh-pengaruh negatif dari luar komunitas mereka sebagaimana terungkap dalam studi ini. Selain itu, adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas agama juga menguatkan kebersamaan mereka, sehingga muncul rasa nyaman di dalam diri kelompok minoritas ketika berdampingan dengan mayoritas.

#### ***Modal-modal sosial pen jembatan (bridging social capital)***

Dalam studi ini, peran modal sosial sebagai jembatan sosial (*bridging social capital*) tampak dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh FKUB, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di kedua kabupaten untuk merajut kembali relasi yang kurang harmonis antara berbagai kelompok. Misalnya, konflik bernuansa agama di Belu sebagaimana telah disebut di atas; atau persoalan pendirian rumah ibadat di Belu yang mula-mula mendapat kesulitan, namun berkat peran FKUB untuk memfasilitasi lewat dialog multi-pihak.

### ***Modal-modal sosial penghubung (linking social capital)***

Modal sosial penghubung (*linking social capital*) tampak penting dalam pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan forum pemuda lintas-agama di setiap kabupaten. Baik FKUB maupun forum pemuda berusaha merajut relasi yang harmonis dan damai antar berbagai elemen dalam masyarakat di ketiga kabupaten untuk memajukan kerjasama, mengakomodir kepentingan berbagai kelompok yang berbeda sekaligus mencegah intoleransi, konflik dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan. FKUB menjamin hal ini dengan selalu mengadakan pertemuan-pertemuan dan silaturahmi serta mengorganisasi dan mengambil bagian dalam perayaan-perayaan besar lintas-agama. Forum pemuda lintas agama mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan hidup sebagaimana terungkap dalam temuan di kedua Kabupaten. Tetapi, yang tak kalah pentingnya di sini adalah budaya yang terbuka yang dapat menerima orang-orang lain di luar suku dan komunitas adat dan budaya dan kesanggupannya untuk merangkul perbedaan-perbedaan dengan nilai-nilai budaya setempat, sehingga tak seorangpun merasa ditolak, disingkirkan atau didiskriminasi.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa intoleransi pada umumnya dapat dicegah atau ditangani secara baik berkat adanya modal-modal sosial yang berperan sebagai pengikat/ pemersatu (*social bonding*), penjemputan (*social bridging*) dan penghubung (*social linking*) antar berbagai kelompok umat beragama yang berbeda-beda di kedua kabupaten. Modal-modal sosial itu berupa nilai-nilai, struktur-struktur, bahasa, simbol, adat-istiadat dan budaya yang telah dihidupi turun-temurun oleh masyarakat setempat. Mereka juga berwujud pemerintah daerah, forum kerukunan agama, forum pemuda lintas agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta berbagai mekanisme yang diciptakan lewat institusi-institusi sosial.

Semua bentuk modal sosial berjalan bersama dan saling melengkapi dan berjalan bersama serta mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas-komunitas. Lewat modal-modal sosial ini masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok di ketiga kabupaten mampu bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal-balik dan saling menguntungkan, dan dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut menjadi maksimal karena didukung oleh semangat proaktif dari berbagai stakeholder yang membangun jalinan relasi di atas prinsip-prinsip timbal-balik, saling menguntungkan dan di atas dasar kepercayaan.

#### **Implikasi**

Dari studi ini serta kesimpulan-kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa implikasi untuk studi-studi lebih lanjut dan pengambilan kebijakan-kebijakan publik: pertama, dalam rangka menjamin toleransi dan mencegah intoleransi, penting memperhitungkan peran modal-modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat. Studi ini telah memperlihatkan bahwa modal-modal sosial ternyata memiliki andil besar dan sumber kekuatan untuk menjaga masyarakat yang harmonis dan damai, rukun dan toleran.

Kedua, pentingnya peran adat-istiadat dan budaya setempat perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah dalam upaya mengembangkan kerukunan dan toleransi berbasis lokal. Bahasa-bahasa, nilai, simbol-simbol dan ungkapan adat telah memainkan peranan penting bagi keutuhan dan harmoni dalam berbagai komunitas di NTT umumnya dan di Kabupaten Sumba Barat dan Belu khususnya.

Ketiga, peran beberapa instansi seperti FKUB dan forum pemuda tampaknya memperkuat ikatan, relasi dan penjembitan sosial antar-umat berbeda agama. Maka, penting di sini untuk mempekuat dan memberdayakan keduanya agar dapat membantu pemerintah daerah setempat dalam menjamin kerukunan dan kedamaian serta mencegah intoleransi dan konflik antar-umat beragama.

Keempat, oleh karena studi ini bersifat kualitatif, maka dibutuhkan studi-studi lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif untuk menguatkan temuan-temuan ini sekaligus mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing modal sosial dalam mencegah dan menangani masalah intoleransi di NTT. Dengan demikian, studi-studi lanjut kiranya bisa berkontribusi bagi upaya dan kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kerukunan, mengembangkan kesadaran dan apresiasi terhadap upaya-upaya positif yang telah dilakukan oleh berbagai modal sosial di NTT untuk menjadi propinsi model bagi Indonesia dalam hal kerukunan dan toleransi, sehingga slogan "Dari NTT untuk Nusantara" semakin bergema dan menjadi sumber pembelajaran.

## Daftar Rujukan

- Anheier, H. dan Kendall, J. 'Interpersonal Trust and Voluntary Associations.' *British Journal of Sociology* 53, 2002, hlm. 343-362.
- Bourdieu, P. "Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital" in *Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2)*, edited by Reinhard Kreckel. Goettingen: Otto Schartz & Co., 1983.
- Claridge, T.. "Social Capital and Natural Resource Management: An important role for social capital?" Unpublished Thesis, University of Queensland, Brisbane, Australia, 2004 diakses 20 Februari 2022 dari <https://www.socialcapitalresearch.com/literature/introduction-social-capital-research/>.
- Coleman, J. C. "Social Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology*. 94, 1988, pp. 95–120.
- Halili. *Supremasi Intoleransi*. Yogyakarta: Setara Institute, 2017 dalam <https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/resensi-buku-supremasiintoleransi/> . Diunduh 4 Februari 2022.
- Nurul, M. Huda. *Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan*, PDF, Jakarta: The Wahid Foundation, 2017, diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1VFWN8blwQzjCqDIHUwyFrCddOTouT8QU/view> , 8 Februari 2022.
- Portes, Alejandro. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology". *Annual Review of Sociology*. 24, 1998, pp. 1–24.

- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Indonesia. „Daftar Skor Indeks Kerukunan Beragama versi Kemenag 2019“, <https://tirto.id/daftar-skor-indeks-kerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH...>
- Putnam, Robert D. (January 1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy*. 6 (1), Januari 1995, pp. 65–78.
- Qodir, Zuly. “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, pp. 429 – 445.
- Rahman, Dylan Aprialdo. “Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16015521/imparsialintoleransi-masih-jadi-masalah-yang-terus-berulang-di-indonesia>. Diunduh 5 Februari 2022.
- Seran, H.Y. *Ema Tetun. Continuity and Change in the Social and Cultural Life of a Tradicional Society in Central Timor Eastern Indonesia*, Kupang: Gita Kasih 2007.
- . “Imparsial Temukan 31 Kasus Intoleransi selama Setahun” dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191117163821-32-449096/imparsial-temukan31-kasus-intoleransi-selama-setahun>. Diunduh 5 Februari 2022.
- . “LIPI: Intoleransi Politik di Indonesia Meningkat” dlm. <https://www.voaindonesia.com/a/lipi-intoleransi-politik-di-indonesiameningkat/4687374.html> diunduh 3 Februari 2022.
- . “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila” dalam <https://www.bpip.go.id/bpip/> . Diunduh 10 Februari 2020.
- Van Deth, Jan D. “Measuring social capital: orthodoxies and continuing controversies.” *International Journal of Social Research Methodology* 6, 2003, hlm. 79.
- Wallis, A. “Social capital and community building. (Building Healthier Communities: Ten Years of Learning) (part 2).” *National Civic Review* 87, 1998, hlm. 317-19.
- Woolcock, M. “Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework”, *Theory and Society* 27 (2), 1998, pp. 151-208.
- \_\_\_\_\_. “Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy,” *World Bank Research* 15 (2), 2000, pp. 225-249.
- Focused Group Discussion**  
FGD di Waikabubak 28 Juni 2022.
- FGD di Atambua, 9 Juli 2022
- Wawancara**  
Abdullah A. Bumaalin, ketua MUI, Waikabubak, 28 Juni 2022.
- Aloysius Saga Ngara, 39 thn, di Bera Dolu, Waikabubak, 15 Juni 2022.
- Apliani Moto, 38 thn, Waikabubak, 13 Juni 2022.
- Constantianus Nggajo, 42 thn. Pastor Paroki St. Petrus dan Paulus, Waikabubak, 14 Juni 2022.



Eduard Mauboy, umat Kristen (GMIT), 30 Juni 2022.

Fahmi Attamimi, Takmir Masjid Atapupu, 29 Juni 2022.

Farid Liliwari, 27 thn, Waikabubak, 21 Juni, 2022.

Fransiskus Didoek selaku Umat Katolik Atambua, 1 Juli 2022.

Haji Kaliman B. Lamarobak, S.Pd, MH, Ketua Umum MUI Kab. Belu dan Wakil Ketua 2 FKUB Kab. Belu, Atambua, 9 Juli 2022.

Haji Uumbu Nay, 72 thn, di Waikabubak, 21 Juni 2022.

I Made Balik, Ketua PHDI dan Anggota FKUB Kab. Belu, di Atambua, 9 Juli 2022.

Imelda Lazakar, Atambua, 30 Juni 2022.

Jeremias Manek Seran, tokoh pemerintah, Ketua DPR Belu, 30-06-2022.

Ketut Putra Adnyama, 66 thn. di Waikabubak, 16 juni 2022.

Lado Regi Tera, 49, di Kampung Tarung, Waikabubak, 27 juni 2022.

Mores Lakabela, Wakil Ketua / Majelis Gereja Petra (GMIT) Atapupu, 29 Juni 2022.

Pdt. Novemberieli Ziraluo, S.Th., Wakil Gembala GPdI Shalom Atambua/Anggota FKUB, 9 Juli 2022.

Pius Maksi Mura, Tokoh adat, Atapupu, 1 Juli 2022.

Rahel Buma, 30 thn, di Waikabubak, 13 Juni 2022.

Romo Paulus Nahak I, Pr Sekretaris FKUB Kab. Belu, di Atambua. 9 Juli 2022.

Rm. Stefanus Boisala, Pr, Pastor Paroki Katedral Atambu, Deken Belu Utara dan Ketua FKUB Kab. Belu, Atambua, 29 Juni 2022.

Romo Yonas S. Giri selaku Pastor Paroki Stella Maris Atapupu dan Ketua Komisi Kepemudaan Kesukupan Atambua dan anggota FKUB Kabupaten Belu, tanggal 29 Juni 2022.

Ustad Yamin, 49 thn, Imam Masjid Baitulah Waikabubak, 21 juni 2022.